

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Narkotika merupakan obat, zat atau bahan yang berguna dalam bidang Kesehatan, pelayanan Kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan tetapi disisi lain narkotika sering disalahgunakan. Penyalahgunaan ini merupakan tindak pidana bagi siapa saja yang mengkonsumsi, memproduksi atau mendistribusikan secara ilegal tanpa ada ketentuan pihak yang berwenang. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” Hukum Indonesia sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menggolongkan narkotika dalam tiga golongan sedangkan menurut *United Nations Commission on Narcotic Drugs* (CND) melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* (Konvensi Tunggal tentang Narkotika) tahun 1961 mengenal ada empat penggolongan narkotika.

Penggunaan narkotika sangat merugikan apabila disalahgunakan dengan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dari pihak yang berwenang,

selain itu pendistribusian narkoba sudah menjadi kejahatan internasional maupun nasional biasanya narkoba ini masuk secara ilegal, terstruktur, dengan keorganisasiannya yang luas dan banyak, narkoba bukan saja kejahatan berat tetapi juga merupakan kejahatan yang terorganisasi yang membuat penyelesaiannya sangat sulit diselesaikan, selain pendistribusiannya yang secara ilegal hampir dipastikan kejahatan narkoba ini disertai dengan tindak pidana lain baik itu pembunuhan, pencurian, dan tindak kriminal lain yang berbahaya. Kejahatan narkoba adalah salah satu bentuk kejahatan yang paling dinamis di dunia, kompleksitas persoalan narkoba disetiap negara menghadapi persoalan yang berbeda dan bahkan saling mempengaruhi persoalan narkoba di negara lain contohnya adalah Amerika Serikat sebagai pasar narkoba utama di benua Amerika, mempunyai persoalan yang pelik karena rumitnya persoalan narkoba di negara-negara Amerika Latin lainnya, contoh lainnya adalah situasi kejahatan narkoba yang ada di negara Kolombia akan berpengaruh terhadap negara tetangga dan negara tujuan produksi narkoba tersebut. Indonesia menjadi salah satu negara tujuan utama narkoba di kawasan Asia, karena itu persoalan narkoba yang terjadi di Indonesia juga sangat dinamis<sup>1</sup>. Jaringan narkoba Indonesia tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan bentuk dan model yang beragam. Penyelesaian masalah narkoba ini harus di selesaikan secara masif, aktif dan dilakukan secara berkesinambungan, selain itu undang-

---

<sup>1</sup> <http://thejournalish.com/ojs/index.php/books/article/view/89/73> pada tanggal 02 maret 2021 pukul 16:33

undang yang mengaturnya pun harus jelas dan tepat dalam menentukan apa-apa saja yang menjadi ancama bagi generasi bangsa Indonesia.

*United Nations Commission on Narcotic Drugs* (CND) Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Narkotika pada hari Rabu 02 Desember 2020 memutuskan mengeluarkan ganja dari Golongan IV Konvensi Tunggal Narkotika 1961 menjadi Golongan I. Keputusan berdasarkan hasil voting PBB, dengan hasil 27 setuju dan 25 menolak (27/25), hasil tersebut bukan berarti menghapus ganja dari daftar obat terlarang. Berdasarkan keterangan resmi CND, sebelumnya pada Januari 2019, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) membuat serangkaian rekomendasi untuk mengubah ruang lingkup pengendalian ganja dan zat terkait ganja, setelah pertimbangan intensif, komisi CND mengambil keputusan pada Rabu (2/12/2020) atas rekomendasi WHO tersebut,<sup>2</sup> hingga saat ini Indonesia masih menggolongkan ganja dalam narkotika golongan I sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I angka 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika “Tanaman ganja, semua tanaman genus-genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.” Keluarnya ganja dari golongan IV menjadi golongan I ketentuan terbaru *Single Convention on Narcotic Drugs* (Konvensi Tunggal tentang Narkotika) tahun 1961 membuat ganja dalam

---

<sup>2</sup><https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/05/131800065/pbb-keluarkan-ganja-dari-golongan-iv-ke-golongan-i-bnn--masih-narkoba?page=all> pada tanggal 23 february 2021 pukul 13:47

hukum Indonesia yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba memiliki makna ganda dan kurang jelas karena hukum Indonesia masih menggolongkan ganja sebagai golongan I atau masih tetap dengan ketentuan yang lama Konvensi Tunggal tentang Narkotika tahun 1961. Penggolongan narkoba menurut hukum Indonesia merupakan hasil ratifikasi dari *Single Convention on Narcotic Drugs* (Konvensi Tunggal tentang Narkotika) tahun 1961 yang disahkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya.

Ganja (*Cannabis Sativa*) merupakan tumbuhan penghasil serat, lebih dikenal karena bijinya mengandung *tetrahidrokanabinol* (THC), zat narkoba yang membuat pemakainya mengalami *euphoria* (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Tanaman semusim ini tingginya dapat mencapai dua meter, berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan elevasi di atas 1.000 meter di atas permukaan air laut ada tiga jenis ganja, yaitu *Cannabis Sativa*, *Cannabis Indica*, Dan *Cannabis Ruderalis*, ketiga jenis ganja ini memiliki kandungan THC berbeda-beda.<sup>3</sup> Nama lain untuk tanaman ganja adalah *marijuana*, *grass*, *weed*, *pot*, *tea*, *Mary Jane*, *produk hemp*, *hashish*, *charas*, *bhang*, *dagga* dan *sinsemilla*, digunakan untuk tujuan pengobatan, ritual atau rekreasional.

---

<sup>3</sup><https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/04/02/354/ulasan-tentang-ganja> pada tanggal 23 february 2021 pukul 14:23

Pemanfaatan daun ganja di dunia medis memang menjadi pro-kontra tersendiri, di Indonesia penggunaan tumbuhan psikotropika ini sebagai obat medis masih mendapat banyak penolakan, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7 menyebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.” Namun ganja tidak masuk di dalam golongan narkotika yang bisa digunakan untuk kesehatan. Hal ini terjadi karena ganja masuk ke golongan I narkotika dan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.<sup>4</sup>

Dalam era-digital saat ini mudahnya mendapat informasi dapat mempengaruhi pola pikir dan keterbukaan seseorang dalam melihat sebuah permasalahan, kontroversi ganja di Indonesia merupakan salah satu efek dari era-digital ini, sudah banyaknya negara yang melegalkan ganja karena diketahui dapat menjadi obat (walaupun masih diskursus Tarik menarik dengan kepentingan politik dan ekonomi) mempengaruhi pemikiran segelintir masyarakat dalam memandang masalah ganja ini. Hasil dari temuan dari *Journal of Scientific Communication*, dengan judul: Pandangan Remaja Terhadap “Legalisasi Ganja” di Indonesia, bahwa adanya terpaan informasi terkait dengan hal-hal yang mendukung legalisasi ganja ini memberikan penguatan informasi pada responden terkait pembenaran legalisasi ganja, Informasi yang dianggap dipercaya pada awalnya dari lingkungan terdekat

---

<sup>4</sup> Karen Abigael Pangkey & R. Rahaditya Kebijakan. 2019 *Hukum Pidana Penggunaan Narkotika Golongan 1 (satu) Jenis “Ganja” untuk Kesehatan*, jurnal hukum adigama, Universitas Tarumanagara

(*inner circle*) baru kemudian bergeser ke media. Informasi ini baik diberikan secara langsung, ataupun informasi yang dibagikan melalui media.<sup>5</sup> Masyarakat Indonesia sendiri terbagi atas dua kelompok dalam melihat ganja di Indonesia, ada yang tetap melihat bahwa ganja adalah salah satu narkotika paling berbahaya tetapi ada juga masyarakat yang mau untuk terbuka dalam melihat ganja sebagai sebuah komoditas yang aman dan baik untuk komoditas ekonomi maupun dibidang kesehatan. Keterbukaan pandangan inilah yang membuka beberapa masyarakat mau mengambil peran dalam permasalahan ganja, Salah satunya adalah Lingkar Ganja Nusantara (LGN) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang merupakan organisasi pertama di Indonesia yang pro akan ganja dan sebagai organisasi yang mewadahi segala aspirasi dari seluruh masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap ganja. Lingkar Ganja Nusantara memiliki berbagai perwakilan daerah yang berperan dalam mengedukasi masyarakat akan tanaman ganja sehingga masyarakat mengetahui dan diharapkan mengerti akan manfaat tanaman ganja tersebut.<sup>6</sup> Kasus Fidelis Ari Suderwato alias Nduk merupakan salah satu kasus paling hangat perihal ketentuan ganja di Indonesia. Fidelis, seorang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau ini menanam 39 batang pohon ganja belakang rumahnya pada 19 Februari 2017 untuk mengobati istrinya yang didiagnosa menderita *syringomyelia* atau tumbuhnya kista berisi cairan (*syrinx*)

---

<sup>5</sup> Gayes Mahestu, Dimas Akhsin Azhar, Veny Purba, 2019, Pandanga Remaja Terhadap “Legalisasi Ganja” di Indonesia. Journal of Scientific Communication.

<sup>6</sup> I Dewa Made Satya Parama, Ikma Citra Ranteallo, Ni Luh Nyoman Kebayantini, PERAN LINGKAR GANJA NUSANTARA DALAM LEGALISASI GANJA, jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

di dalam sumsum tulang belakang, sang istri akhirnya meninggal dunia tepat 32 hari setelah Fidelis ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN).<sup>7</sup> Kasus ini jugalah yang banyak menarik perhatian masyarakat Indonesia dalam memandang bahwa perlu kejelasan perihal tanaman ganja dalam hukum Indonesia dewasa ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana pandangan hukum Indonesia atas perubahan ketentuan Konvensi Tunggal tentang Narkotika tahun 1961 yang diratifikasi hukum Indonesia terkait dengan Permenkes nomor 44 tahun 2019 perihal ganja yang merupakan narkotika golongan 1.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan, maka tujuan penelitian dari karya tulis untuk mencari data dan menganalisis pandangan hukum Indonesia atas perubahan ketentuan Konvensi Tunggal tentang Narkotika tahun 1961 yang diratifikasi hukum Indonesia terkait dengan Permenkes nomor 44 tahun 2019 perihal ganja yang merupakan narkotika golongan 1.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

---

<sup>7</sup><https://regional.kompas.com/read/2017/04/04/06210031/akhir.perjuangan.fidelis.merawat.sang.istri.dengan.ganja.bagian.1.?page=all> pada tanggal 02 maret 2021 pukul 18:30

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang baik dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan khususnya dalam hukum pidana terkait penggolongan narkotika dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

### a. Pemerintah Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menjadi bahan acuan pertimbangan untuk melakukan revisi Permenkes nomor 44 tahun 2019 perihal ganja sebagai narkotika golongan 1 dalam mewujudkan asas kepastian hukum dan juga pemanfaatan tumbuhan ganja bagi Indonesia

### b. Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menjadi acuan baik bagi hakim dalam memutus putusan, polisi dalam pemberantasan narkotika, jaksa dalam menjatuhkan tuntutan, maupun advokat untuk memperjuangkan keadilan seadil-adilnya, agar penegak hukum bekerja secara profesional, cakap, jujur, dan bijaksana dalam menangani kasus perihal narkotika.

### c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat langsung kepada masyarakat dalam mendapatkan informasi dan menjadi media edukasi



penaggulangan dan pencegahan penggunaan narkoba dalam kehidupan masyarakat.

d. Penulis

Proses penelitian dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum pidana khususnya pada asas kepastian hukum dalam penggolongan narkoba ganja menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang perubahan golongan narkoba terakhir dilakukan melalui Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba agar kelak dapat membantu masyarakat dan mewujudkan kepastian hukum dalam negara Republik Indonesia.

**E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “tinjauan hukum pidana terhadap Permenkes nomor 44 tahun 2019 perihal ganja sebagai golongan narkoba golongan I” merupakan karya asli dari penulis yang baru dan bukan merupakan hasil duplikasi maupun plagiarisme dari karya orang lain. Dalam penulisan karya tulis ini, penulis akan memberikan perbandingan dari hasil karya tulis terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa skripsi dengan tema yang sama yakni mengenai “penggolongan narkoba dan ganja”, namun permasalahan yang dibahas berbeda dengan milik penulis. Adapun beberapa penelitian dengan tema yang serupa adalah sebagai berikut:

1. RAYMOND HIDAYAT, NPM 1310851034 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Tahun 2019. Judul skripsi: Respon Lingkaran Ganja Nusantara Terhadap *United Nations Single Convention on Narcotic and Drug* Di Indonesia. Rumusan masalahnya adalah Ganja merupakan tanaman yang memiliki potensi positif untuk dalam bagian industri dan medis. Hal ini masih terhalang hukum UU Narkotika nomor 35 tahun 2009 yang mengkategorikan tanaman ganja sebagai salah satu zat terlarang dan berbahaya bagi kesehatan. Merujuk kepada Konvensi PBB yaitu *UN Single Convention on Narcotics and Drugs* 1961 sebagai konsekuensi Indonesia ikut serta dalam meratifikasi persetujuan global. Usaha pergerakan LGN dalam mengkampanyekan tentang legalisasi ganja sebagai bentuk respon terhadap tatanan internasional yang berbentuk *UN Single Convention on Narcotics and Drugs* 1961 sebagai bentuk pengembalian edukasi, informasi objektif dan regulasi tentang ganja, yang disertakan perubahan akan ide-ide atau tatanan baru yang memanfaatkan tanaman ganja dan diilegalkan secara hukum dan LGN muncul sebagai bentuk dari *counter hegemoni* akan tatanan global “*UN Single Convention* 1961” dalam mengkampanyekan legalisasi tentang tanaman ganja sebagai salah satu tanaman yang berdasarkan kearifan lokal memiliki manfaat bagi masyarakat Indonesia.

Hasil penelitiannya adalah Diratifikasinya *United Nations Single Convention on Narcotic and Drugs* tahun 1961 oleh negara Indonesia, berdasarkan analisa penulis hanya terlihat sebagai sebuah *consensus demokratis* yang diamini oleh kelompok *non-hegemon* seperti Indonesia. Hal

ini yang kemudian menghasilkan konflik dan kontradiksi dalam ruang lingkup nasional-negara sehingga memunculkan gerakan lokal sebagai bentuk dari *counter hegemony* atas dominasi tersebut. Menurut kesimpulan penulis, respon dari LGN terhadap UN *Single Convention* 1961 yang merupakan bentuk hegemoni adalah suatu bentuk counter hegemony dalam gerakan intelektual yang diidentifikasi oleh pentiori hubungan internasional Antonio Gramsci dan Robert Cox melalui strategi *Intellectual Organic, Historical Bloc, dan War of Position*.

Skripsi RAYMOND HIDAYAT jika dibandingkan dengan skripsi penulis sangat lah berbeda bahkan bisa dilihat langsung pada fakultas dan bidang keilmuan penulis, skripsi yang penulis pakai sebagai pembanding berasal dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang membuat hasil penelitiannya memiliki sudut pandang yang berbeda seperti keperluannya yang lebih ke aspek bagaimana respon negara mengikuti ketentuan Konvensi internasional dan bagaimana seharusnya status keanggotaan mengikuti perjanjian internasional. Jelas berbeda dengan penelitian penulis yang lebih melihat dari sudut pandang ilmu hukum sesuai dengan keilmuan penulis dan lebih berusaha untuk mendapat jawaban perlukah revisi undang-undang mengenai penggolongan tanaman ganja. Ketentuan yang membuat skripsi RAYMOND HIDAYAT dan skripsi penulis mirip adalah karena sama-sama mengkaji ganja sebagai tanaman narkotika menurut Konvensi tunggal tahun 1961.

2. EGA YUNI RAHMAWATI, NPM 1115040000023, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Judul Skripsi: Pemidanaan Pelaku Penanam Ganja Untuk Pengobatan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pnsag) Rumusan masalahnya adalah Ega Yuni Rahmawati mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terkait dengan masalah yang diteliti, antara lain: Tindak pidana penyalahgunaan narkotika, Penggunaan ganja sebagai obat, Konsumsi narkotika yang menyebabkan ketergantungan, Peredaran narkotika.

Hasil dari penelitiannya adalah Dampak dari putusan Hakim tentang larangan penanaman ganja untuk pengobatan kasus Fidelis ialah berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat akan pengadilan sebagai tempat untuk mencari keadilan, jika berfokus pada formalitas atau kepastian hukum, memang sudah sepantasnya fidelis dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun apa yang terjadi di kasus ini dibutuhkan penilaian hukum secara substantif maksudnya kasus ini membutuhkan pertimbangan hukum yang didasari oleh akal budi, keadilan serta hati nurani sebagai manusia. Dalam kasus ini pertimbangan asas kemanfaatan hukum dan keadilan sangat diperlukan guna penegakan keadilan selanjutnya. Dalam Menurut Hukum Islam keadaan darurat membolehkan seseorang melakukan upaya pengobatan dalam rangka menjaga nyawa. Darurat disini karena sebelumnya istri terdakwa sudah menjalani upaya ke berbagai rumah sakit dan pengobatan alternatif lainnya namun tidak ada kemajuan sama sekali bahkan

kondisinya semakin menurun. Hal-hal yang dilarang dalam syariat boleh dilakukan jika ada kebutuhan yang mendesak, yakni dalam suatu keadaan darurat. Yaitu sebuah keadaan yang mana apabila ia tidak melakukan hal yang diharamkan tersebut, ia bisa kehilangan nyawanya.

Skripsi EGA YUNI RAHMAWATI dan skripsi penulis memiliki banyak perbedaan yang sangat mencolok antara lain penulis lebih fokus dalam ketentuan tepat atau tidaknya revisi penggolongan ganja sebagai narkoba golongan I sedangkan skripsi pembanding adalah mempertanyakan keputusan pengadilan atas putusan kasus fidelis (Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pnsag) dan hasil penelitiannya pun sangat tampak berbeda skripsi penulis mengharapkan kepastian hukum dalam undang-undang sedangkan skripsi pembanding ini hanya melihat respon masyarakat dengan suatu putusan yang dikeluarkan. Terlepas itu ada Kesamaan tema antara penulis dan Skripsi Ega Yuni Rahmawati yaitu bagaimana melihat aspek kegunaan ganja sebagai tanaman obat dan mempersoalkan bagaimana pemedanaanya bila ganja digunakan sebagai tanaman obat dan sama-sama membandingkan hukum positif penggunaan ganja dengan suatu pandangan atau ketentuan hukum, penulis membandingkan hukum positif Indonesia terhadap ketentuan terbaru atas hukum yang diratifikasi Indonesia sedangkan Skripsi Ega Yuni Rahmawati membandingkan hukum islam dengan putusan hakim yang menyalahkan perbuatan fidelis.

3. Devi Mutiara Niki Putri, NPM C93216069, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. judul skripsi: TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA DALAM PASAL 114 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 54/Pid.Sus/2019/PN.Jbg) pada Rumusan masalahnya adalah Tindak pidana penyalahgunaan dan menjadi perantara dalam kegiatan jual beli narkoba golongan I, Sanksi tindak pidana penyalahgunaan dan menjadi perantara dalam suatu kegiatan jual beli narkoba golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sanksi tindak pidana penyalahgunaan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I berdasarkan hukum pidana islam, Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.54/Pid.Sus/2019/PN.Jbg, dan Tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum hakim tentang tindak pidana penyalahgunaan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.54/Pid.Sus/2019/PN.Jbg.

Hasil dari penelitiannya adalah Sanksi hukum terhadap suatu kejahatan narkoba dalam putusan No.54/Pid.Sus/2019/PN.Jbg menurut hukum pidana islam setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Didalam

menentukan suatu hukuman hakim juga wajib memperhatikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103. Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau sudah terbukti sebagai penyalahguna narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jika dikaitkan dengan *fiqih jinayah* seorang pelaku kejahatan narkoba dalam putusan diatas maka termasuk suatu pelanggaran yang melanggar kemaslahatan umum dalam kalangan masyarakat, dan pertimbangan hukum hakim dalam pandangan hukum pidana islam terhadap pelaku narkoba golongan I dalam pandangan hukum pidana islam mengenai tindak pidana narkoba golongan I tidak dijelaskan secara terperinci, akan tetapi jika dikaitkan dengan sanksi narkoba, perbuatan penyalahguna narkoba dalam hukum pidana islam termasuk *ta'zir* maka yang menentukan suatu hukumnya adalah penguasa (*ulil amri*), sedangkan apabila narkoba dikaitkan dengan jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang berkaitan dengan kemaslahatan umat.

Skripsi ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain adalah kesamaan dalam pengkajian narkoba menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sama sama meninjau ketentuan yuridis dalam mempertanyakan penggolongan ganja dan sama-sama membandingkan dengan pandangan hukum yang lain, dimana penulis meninjau ketentuan yuridis dalam penggolongan ganja menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan ketentuan perserikatan bangsa bangsa dalam perubahan ketentuan

Konvensi tunggal tahun 1961 sedangkan skripsi pembandingan ini melihat bagaimana penerapan sanksi Penggunaan Narkoba Dan Psikotropika khususnya ganja menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hukum islam. Skripsi Devi Mutiara Niki Putri menggunakan pandangan perspektif hukum islam dalam ketentuan golongan ganja dengan mengambil studi kasus Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 54/Pid.Sus/2019/PN.Jbg sebagai acuan nya sedangkan penelitian penulis murni melihat tinjauan yuridis dalam penggolongan ganja menurut hukum ratifikasi yang telah berubah dan selain itu skripsi Devi Mutiara Niki Putri melinjau dengan menggunakan hirarki hukum dalam hukum islam sedangkan penelitian penulis melihat ketentuan hukum ratifikasi.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Hukum Pidana**

Secara harfiah istilah hukum diambil dari Bahasa Belanda yaitu *Straafrecht*, *straf* berarti pidana, sanksi atau hukuman dan *recht* berarti adalah Hukum. Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.



- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>8</sup>

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”

## 2. Permenkes Nomor 44 Tahun 2009

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika merupakan aturan paling baru dalam penggolongan narkotika di Indonesia dengan begitu pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1595), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

## 3. Ganja

Ganja (*Cannabis sativa*) adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, *tetrahidrokanabinol* (THC, *tetra-hydro-cannabinol*) yang dapat membuat pemakainya mengalami *euforia* (rasa senang yang berkepanjangan tanpa

---

<sup>8</sup> Moeljatno, S.H., M.H. 2008 ,*Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.1

sebab). Tanaman ganja biasanya dibuat menjadi rokok mariyuana.<sup>9</sup> *Cannabis* adalah genus tumbuhan berbunga dari *famili Cannabaceae*. Jumlah spesies dalam genus masih diperdebatkan.

#### 4. Narkotika

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”. Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan,<sup>10</sup> di Indonesia sendiri narkotika digolongkan menjadi 3 bagian.

#### 5. Narkotika Golongan 1

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menggolongkan narkotika menjadi 3 bagian, Narkotika golongan I adalah “Narkotika yang hanya dapat

<sup>9</sup> Tim LGN. 2011, *Hikayat Pohon Ganja*. Jakarta, Gramedia, Hlm. 9.

<sup>10</sup> Moh. Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 21.

digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. Contohnya adalah morfin, heroin, petidin, candu, Ganja, hashis. Kokain meliputi serbuk kokain, pasta kokain daun koka.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan problematika hukum yang diteliti, penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum normatif atau sering juga dikenal penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang memfokuskan suatu penelitian pada norma-norma dan dasar hukum yang berlaku. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder<sup>11</sup> berupa bahan hukum baik yang bersifat khusus atau bersifat umum, Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keputusan *United Nations Commission on Narcotic Drugs* (CND) memutuskan mengeluarkan ganja dari Golongan IV Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dengan hukum Indonesia melalui perubahan golongan narkotika terakhir dengan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 Perihal Ganja Sebagai Narkotika Golongan I.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PTJakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain terdiri dari atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keputusan *United Nations Commission on Narcotic Drugs* (CND) memutuskan mengeluarkan ganja dari Golongan IV Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dengan hukum Indonesia Perihal Ganja Sebagai Narkotika Golongan I.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Konvensi Wina Tahun 1969 Pasal 2 ayat (1) “suatu persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam satu instrumen atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun namanya”.
- 4) Konvensi Tunggal tentang Narkotika (*Single Convention on Narcotic Drugs*) tahun 1961

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika
- 10) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- 11) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian
- 12) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi.
- 13) *Press Statement Commission on Narcotic Drugs (CND) 2 December 2020 votes on recommendations for cannabis and cannabis-related substances* (Pernyataan Pers Komisi Narkotika Perserikatan

Bangsa-Bangsa 2 Desember 2020 pemungutan suara tentang rekomendasi untuk zat terkait ganja dan ganja)

14) *Commission on Narcotic Drugs Reconvened sixty-third session, Implementation of the international drug control treaties* (Sidang Komisi Obat Narkotika yang Direkomendasikan ke 63, Implementasi perjanjian pengawasan narkoba internasional).

15) *Draft decision submitted by the Chair, Changes in the scope of control of substances: proposed scheduling recommendations by the World Health Organization on cannabis and cannabis-related substances.* (Draf keputusan yang diajukan oleh Ketua, Perubahan ruang lingkup pengendalian zat: rekomendasi penjadwalan yang diusulkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia tentang ganja dan zat terkait ganja)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki hubungan erat terkait dengan bahan hukum primer guna membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>12</sup> Dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, bahan internet yang dipercaya kebenarannya dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

---

<sup>12</sup> Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, hlm 295.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder, menganalisis dan mempelajari dasar hukum, buku, dan dokumen yang berkaitan Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 Perihal Ganja Sebagai Narkotika Golongan I.

### 4. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari penelitian ini dengan mendasarkan pada aturan hukum, harmonisasi dan sinkronisasi undang-undang, pendapat atau teori hukum dalam rangka menjawab rumusan masalah dalam penelitian yang penulis beri judul “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 Perihal Ganja Sebagai Narkotika Golongan I”.

### 5. Proses Berfikir

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan proses berfikir deduktif yaitu proses berfikir diawali dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Data kepustakaan disusun dengan cara sistematis sehingga saling melengkapi, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ganja sebagai narkotika golongan I, dalam hal ini, proposisi umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai ganja sebagai narkotika golongan I, dan Proposisi yang khusus berupa hasil penelitian tentang Tinjauan Hukum

Pidana Terhadap Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 Perihal Ganja Sebagai Narkotika Golongan I.

